



**KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH  
DI BENGKULU, 10-12 JUMADIL AKHIR 1440 H / 15-17 FEBRUARI 2019 M**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Sidang Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan di Kota Bengkulu pada tanggal 10-12 Jumadil Akhir 1440 H/ 15-17 Februari 2019 M, setelah:

Memperhatikan : dan seterusnya....;

Menimbang : dan seterusnya....;

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah BAB IX Pasal 24 ayat (1) sampai dengan (4);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 23 Ayat (1) sampai dengan (9);
3. Keputusan Mukthamar Muhammadiyah ke-47.

MEMUTUSKAN:

1. Mengesahkan hasil sidang komisi A tentang: *Organisasi, Tata Tertib Mukthamar Muhammadiyah ke-48, Tata Tertib Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2020-2025, dan Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2020-2025* sebagaimana terlampir.
2. Mengesahkan hasil sidang komisi B tentang *Perubahan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah* sebagaimana terlampir.
3. Mengesahkan hasil sidang komisi C tentang *Pemikiran Strategis Kebangsaan Tanwir Muhammadiyah Bengkulu Bagi Pemegang Mandat Rakyat Tahun 2019 dan Risalah Pencerahan* sebagaimana terlampir.

Bengkulu, 12 Jumadil Akhir 1440 H  
17 Februari 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549



Sekretaris Umum,

Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM. 750178



**KEPUTUSAN TANWIR MUHAMMADIYAH  
TAHUN 2019 DI KOTA BENGKULU  
TENTANG  
RISALAH PENCERAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Islam adalah agama yang membawa dan menyebarkan risalah pencerahan (*din at-tanwir*) mengeluarkan umat manusia dari kegelapan (*al-dhulumat*) kepada kehidupan yang tercerahkan (*al-nur*). Misi kerisalahan Muhammad telah mengeluarkan bangsa Arab “jahiliyah” dalam struktur kepercayaan penyembah berhala, menista perempuan, berniaga dengan riba, memperbudak manusia, dan menyelesaikan sengketa dengan pertumpahan darah menjadi masyarakat Islam yang bertauhid, memuliakan manusia baik laki-laki maupun perempuan, berniaga secara halallan-thayyibah, menyelesaikan konflik dengan damai, serta membangun tatanan sosial-kebangsaan yang berkeadaban.

Pencerahan merupakan nilai keutamaan yang tertanam dalam segenap kebaikan jiwa, pikiran, sikap, dan tindakan yang maslahat, berkeadaban, dan berkemajuan. Dengan berislam yang mencerahkan, setiap muslim senantiasa menyebarkan akhlak mulia yang menebar ihsan yang melampaui sekaligus rahmat bagi semesta alam. Sebaliknya Islam melarang umatnya menyebarkan akhlak yang tercela (*al-akhlaq al-madhmumah*) yang membawa kerusakan di muka bumi (*fasad fil-ardl*).

Jika Islam dihayati secara murni maka setiap muslim menjadi cerah hati, pikiran, sikap, dan tindakannya. Setiap muslim yang tercerahkan selalu berbuat benar, baik, cinta kasih, damai, kata sejalan tindakan, menebar kesalehan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan universal, gemar bekerjasama (*taawun*) dalam kebaikan dan ketaqwaan, suka beramal salih, beramar ma’ruf-nahi munkar dengan cara yang ma’ruf, tidak akan mudah marah, buruk ujaran, iri, dengki, hasud, dendam, congkak, menebar permusuhan, dan segala perangai yang buruk. Islam yang mencerahkan belum menjadi kenyataan dalam kehidupan keummatan dan kebangsaan. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak terjadi kekerasan, sikap *takfiri*, penyebaran *hoax*, intoleransi, ujaran kebencian dan permusuhan, serta praktik hidup yang menggambarkan kesenjangan antara lisan dan perbuatan.

Sebagai gerakan yang menisbahkan dirinya sebagai “pengikut Nabi Muhammad”, Muhammadiyah berusaha mengaktualisasikan Islam Berkemajuan dengan menghadirkan Islam sebagai agama pencerahan, pembangun kemajuan dan peradaban (*din al-hadlarah*). Karenanya, Tanwir Muhammadiyah tahun 2019 di Bengkulu menyampaikan Risalah Pencerahan sebagai berikut:

1. Beragama yang mencerahkan mengembangkan pandangan, sikap, dan praktik keagamaan yang berwatak tengahan (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki maupun perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, menghormati kemajemukan, dan pranata sosial yang utama sebagai aktualisasi nilai dan misi *ramhatan lil-‘alamin*.
2. Beragama yang mencerahkan ialah menghadirkan risalah agama untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural.

Gerakan pencerahan menampilkan agama untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan.

3. Beragama yang mencerahkan dengan khazanah *Iqra* menyebarluaskan penggunaan media sosial yang cerdas disertai kekuatan literasi berbasis *tabayun*, *ukhuwah*, *ishlah*, dan *ta'aruf* yang menunjukkan akhlak mulia. Sebaliknya menjauhkan diri dari sikap saling merendahkan, *tajassus*, *su'udhan*, memberi label buruk, menghardik, menebar kebencian, bermusuhan-musuhan, dan perangai buruk lainnya yang menggambarkan akhlak tercela.
4. Dalam beragama yang mencerahkan, Muhammadiyah memaknai dan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar mengerahkan segala kemampuan (*badlul-juhdi*) untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Islam bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik, dan permusuhan.
5. Dengan spirit beragama yang mencerahkan, umat Islam dalam berhadapan dengan berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan yang kompleks dituntut untuk melakukan perubahan strategi dari perjuangan melawan sesuatu (*al-jihad li-al-muaradhah*) kepada perjuangan menghadapi sesuatu (*al-jihad li-al-muwajahah*) dalam wujud memberikan jawaban-jawaban alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama.
6. Beragama yang mencerahkan diperlukan untuk membangun manusia Indonesia yang religius, berkarakter kuat dan berkemajuan untuk menghadapi berbagai persaingan peradaban yang tinggi dengan bangsa-bangsa lain dan demi masa depan Indonesia berkemajuan yang dicirikan oleh kapasitas mental yang membedakan dari orang lain seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat khusus lainnya. Sementara nilai-nilai kebangsaan lainnya yang harus terus dikembangkan adalah nilai-nilai spiritualitas, solidaritas, kedisiplinan, kemandirian, kemajuan, dan keunggulan.
7. Beragama yang mencerahkan diwujudkan dalam kehidupan politik yang berkeadaban luhur disertai jiwa ukhuwah, damai, toleran, dan lapang hati dalam perbedaan pilihan politik. Seraya dijauhkan berpolitik yang menghalalkan segala cara, menebar kebencian dan permusuhan, politik pembelahan, dan yang mengakibatkan rusaknya sendi-sendi perikehidupan kebangsaan yang majemuk dan berbasis pada nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa.
8. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bermisi dakwah dan tajdid berkomitmen kuat untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang mencerahkan kehidupan. Jiwa, alam pikiran, sikap, dan tindakan para anggota, kader, dan pimpinan Muhammadiyah niscaya menunjukkan pencerahan yang Islami sebagaimana diajarkan oleh Islam serta diteladankan dan dipraktikkan oleh Nabi akhir zaman.

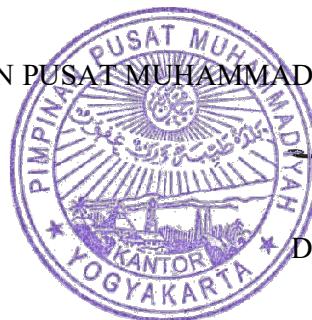
Bengkulu, 12 Jumadil Akhir 1440 H  
17 Februari 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM. 750178



## REKOMENDASI TANWIR MUHAMMADIYAH DI KOTA BENGKULU

Berdasarkan Pidato Presiden Republik Indonesia, Pidato Iftitah Ketua Umum PP Muhammadiyah, pokok-pokok pikiran PP Muhammadiyah, Risalah Pencerahan, Pemikiran Strategis Kebangsaan, dan saran-saran peserta, Sidang Tanwir menyampaikan Rekomendasi kehidupan keummatan, kebangsaan, dan kenegaraan sebagai berikut:

1. Menjadikan Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia sebagai fondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta arah moral-spiritual bangsa. Kebijakan-kebijakan pemerintah hendaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jatidiri bangsa tersebut seraya menghindari primordialisme SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
2. Menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa. Dalam menjalankan amanat agar benar-benar menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing dalam segala bentuknya, mengutamakan sumberdaya dalam negeri, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.
3. Mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
4. Melakukan rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia berbasis pada karakter bangsa sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju. Hendaknya ditempuh kebijakan yang benar-benar terfokus, tegas, dan jelas dalam memanfaatkan 20 persen anggaran pendidikan untuk semata-mata pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul sebagaimana amanat konstitusi.
5. Menjalankan pemerintahan dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat konstitusi serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Hukum jangan dijadikan alat kekuasaan dan politik tertentu yang merugikan kepentingan umum dan menyebabkan hilangnya kesamaan kedudukan semua orang di depan hukum (*equality before the law*). Pejabat negara yang diberi jabatan dalam penegakkan hukum hendaknya bebas dari partai politik dan kepentingan politik apapun yang menyebabkan terjadinya politisasi dan penyalahgunaan hukum yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.
6. Melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip *good governance* serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjunjung tinggi meritokrasi dan profesionalisme tanpa disandera oleh kepentingan-kepentingan politik partisan dari para pejabat pemerintahan maupun partai politik dan golongan. Dalam reformasi birokrasi tersebut penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara.

7. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam melindungi kepentingan dalam negeri, serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar sebagai kekuatan strategis dalam percaturan global. Dalam sejumlah hal yang menyangkut kepentingan dalam negeri serta tegaknya perdamaian dunia hendaknya Indonesia lebih tegas dan berani dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri sesuai jatidiri negara yang berdaulat.
8. Penataan kembali pelaksanaan kebijakan kesehatan termasuk didalamnya Sistem Jaminan Kesehatan, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, fasilitasi kaum difabel dan penanganan kebencanaan yang lebih optimal dalam rangka menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan terhadap mereka yang membutuhkan.
9. Penguatan organisasi kemasyarakatan dan *civil society* diantaranya Muhammadiyah yang telah berjuang dan berperanserta mendirikan Republik Indonesia agar benar-benar memiliki posisi serta peranan penting dan strategis serta tidak mengalami peminggiran dan diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Organisasi kemasyarakatan tersebut berfungsi sebagai kekuatan moral yang menegakkan nilai-nilai utama kebangsaan sekaligus menjadi kekuatan kritik-konstruktif dan penyeimbang demi tegaknya Indonesia sebagai negara-bangsa yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

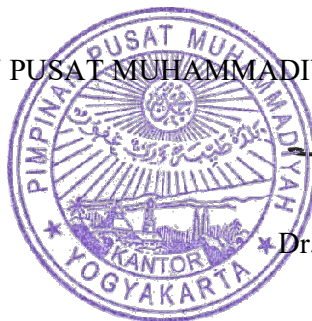
Bengkulu, 12 Jumadil Akhir 1440 H  
17 Februari 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM. 750178